



Judul	: Percepat Hasil Riset Bioteknologi ke Petani
Tanggal	: Senin, 12 Februari 2024
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 9

Segera Sahkan RUU Konservasi SDHE

Percepat Hasil Riset Bioteknologi Ke Petani

Senayan mendukung percepatan hasil riset berbasis bioteknologi untuk menjaga ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan begitu, petani memiliki peluang besar untuk memperoleh benih unggul yang berkualitas dan menguntungkan.

ANGGOTA Komisi IV DPR Hermanto mengatakan, produk rekayasa genetika ini merupakan strategi penting untuk mengamankan keamanan hayati kita. "Karena ini menyengkut persoalan daya dukung pangan bangsa Indonesia," ucapnya kepada *Rakyat Merdeka*, kemarin.

Hermanto bilang, riset berbasis bioteknologi menjadi solusi menghadapi kondisi lahan pertanian yang terus menyempit dan tantangan iklim. Di satu sisi, penggunaan teknologi untuk intensifikasi pertanian juga belum maksimal.

"Sehingga kita perlu upaya-upaya untuk meningkatkan produktivitas produksi pangan dan pertanian. Supaya bibit-bibit dan benih-benih yang kita tanam itu betul-betul terlindungi dari faktor-faktor penyakit dan faktor-faktor yang dapat menurunkan kualitas," katanya.

Sayangnya, lanjut dia, aturan dan regulasi terkait produk bioteknologi atau produk rekayasa genetika ini masih sangat sempit. Sebab masih diatur

dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika (PRG). Sementara payung hukumnya, yakni Rancangan Undang-Undang (RUU) Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDHE) sampai saat ini belum dibahas di DPR.

"Tentu ini merupakan bagian penting bagi kita untuk menyegerakan undang-undang (KSDHE) tersebut," jelas politisi Fraksi PKS ini.

Dia mengatakan, sejatinya peran serta seluruh komponen masyarakat untuk melakukan penelitian dan pengembangan bioteknologi di dalam negeri sangat dibutuhkan. Toh ini merupakan bagian dari perlindungan sumber-sumber daya hayati Indonesia yang spesiesnya cukup banyak.

"Ini yang belum kita manfaatkan (pengembangan penelitian dan pengembangan bioteknologi dalam negeri) secara optimal untuk kepentingan yang lebih besar lagi. Yaitu, memenuhi pangan bangsa Indonesia yang sekarang jumlahnya mencapai

275 juta jiwa," terangnya.

Hermanto lalu menyoroti kontribusi Komisi Keamanan Hayati PRG, Balai Kuning Keamanan Hayati PRG, dan Tim Teknik Keamanan Hayati PRG yang dibentuk sebagai tindak lanjut PP Nomor 21 Tahun 2005. Ketiga lembaga tersebut memang memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam memberikan penilaian, selektivitas terhadap *exit-permit* terhadap sumber-sumber hayati ini.

Sehingga baik hasil riset hingga produk bioteknologi yang keluar dan masuk ke Indonesia ini betul-betul terselaki secara baik. Dengan demikian, dapat dipastikan produk rekayasa yang masuk atau keluar adalah benar-benar berkualitas tinggi dan tidak membawa penyakit.

Dijelaskannya, memang perlunya perbaikan tahapan untuk memastikan riset bioteknologi yang dihasilkan peneliti adalah benar-benar yang dibutuhkan oleh petani. Tahapan tersebut mulai dari uji demplot, uji lapangan, hingga akhirnya memperoleh sertifikasi dan izin edar ke masyarakat.

Sebab bisa saja, menurutnya, ketika riset dilakukan, hasilnya menjadi bagus lantaran ada perlakuan-perlakuan yang bersifat spesifik. Sehingga hasil riset itu tidak bisa serta merta langsung diperlakukan dalam dunia nyata.

Ketika melihat benih hasil riset

bioteknologi tersebut berhasil, petani tentu menjadi sangat tertarik.

"Tapi persoalan lainnya kan juga soal biaya, soal kemudahan, segala macamnya itu. Kalau misalnya costnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada, tentu menjadi persoalan juga bagi petani. Apalagi sekarang ini ketersediaan pupuk sangat terbatas, mabah lagi kan," katanya.

Dia berharap, Pemerintah menjembatani percepatan realisasi hasil riset bioteknologi untuk menjawab kebutuhan petani akan benih yang berkualitas, unggul dan tahan cuaca ataupun serangan hama. Regulasinya tidak seperti sekarang di mana para peneliti mengeleuhkan bahwa butuh minimal waktu 15 tahun bagi suatu riset bioteknologi untuk bisa massif ke petani.

Terpisah, Biotechnology and Seed Manager CropLife Indonesia Agustine Christela Melviana meluruskan pendapat yang keliru seakan-akan riset riset bioteknologi berbahaya dan mengancam lingkungan. Dia pun menegaskan, tanaman dan benih yang dikembangkan dengan ilmu bioteknologi aman dikonsumsi.

Dijelaskannya, keamanan bioteknologi telah dikaji secara menyeluruh oleh berbagai lembaga riset dan kesehatan dunia seperti Organisasi Kese-

hatan Dunia (WHO), Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), dan Badan Perlindungan Lingkungan Hidup Amerika Serikat (EPA). Sementara di Indonesia, sudah diatur oleh Komisi Keamanan Hayati PRG melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2005, baik untuk keamanan pangan, pakan maupun lingkungan.

Komisi Keamanan Hayati ini ditunjuk langsung oleh Presiden dan di dalamnya memiliki dua aliansi riset bioteknologi yang akan mengkaji keamanan pangan, pakan, dan lingkungan. Lembaga ini yang menentukan lama tidaknya sebuah hasil riset bioteknologi dilepas ke masyarakat.

"Jadi enggak sembarangan ini. Misalnya saya punya benih hasil riset strawberry nggak punya biji, ini saya mau tanam di Ciwidey, ya nggak bisa," ujarnya.

Namun sayangnya, lanjut dia, butuh waktu lama bagi petani untuk bisa merasakan sentuhan riset bioteknologi. Untuk riset perbenihan saja dibutuhkan minimum waktu sampai 15 tahun. Lamanya durasi tersebut untuk keperluan riset, uji lapangan, uji laboratorium, sertifikasi benih, hingga pelepasan.

"Jadi kebanyakan nggak misalnya petani hari ini di lapangan hadapi hama, tapi 15 tahun baru rilis (benih unggulnya). Keburu nggak jadi petani lagi bapaknya," ujarnya. ■ KAL